**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

1. **Sejarah Berdirinya IJEPA**

Sejarah IJEPA pada mulanya disaat pertemuan APEC pada bulan November presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Shinzo Abe sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Kemudian hasil pembicaraan tersebut ditindaklanjuti antara menteri Perdagangan kedua pihak pada bulan Desember 2004. Sebagai langkah awal adalah diadakannya *Joint Study*, melalui Joint *Study Group meeting* (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal Desember 2004-Juli 2005). Hasil JSG merekomendasikan manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), yang kemudian diikuti dengan seri perundingan atau negoisasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006.[[1]](#footnote-1)

Pada mulanya Jepang memandang Asia sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prosfek cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar ke-4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra adalah IJEPA (*Indonesian Japan Economic Partnership Agreement*) perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak secara *fair*, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam kesepakatan IJEPA antara lain perdagangan barang, pengaturan terkait asal barang dan prosedur kepabeanan. Penandatangan perjanjian tersebut telah dilakukan oleh baik kepala negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta.[[2]](#footnote-2)

IJEPA ditandatangani pimpinan kedua negara yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 20 Agustus 2007 lalu disahkan melalui Peraturan Presiden No.26 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008. Kemudian diikuti *Exchane Diplomatic Notes* IJEPA pada 1 Juni 2008. Dipilihnya Jepang sebagai mitra IJEPA pertama bagi Indonesia tidak terlepas dari pengalaman hubungan saling menguntungkan yang telah berlangsung lama serta derajat komplementaritas yang tinggi antara ekonomi kedua negara, bahwa Jepang merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia, sumber investasi yang terbesar dan sumber bantuan luar negeri bilateralnya yang terbesar.

Kesepakatan ini akan merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan oleh Indonesia, dan merupakan perjanjian yang paling komprehensip. IJEPA adalah sebuah “*Free Trade Agreement New-Age*” (FTA Babak baru) yang terdiri dari 13 isu yang komprehensip dan bersifat WTO-Plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur di WTO) peningkatan kapasitas (*capacity building)* sebagai bagian dari “*Partnership Agreement*” (kemitraan). Kebanyakan media di Indonesia hanya mengulas mengenai aspek perdagangan barang dan kemitraannya saja, dan melupakan isu-isu sensitif yang potensial merugikan, yaitu mengenai investasi, sektor jasa-jasa, HAKI, energi, dan belanja pemerintah.

Indonesia mewakili pasar asing yang potensial apabila pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dapat terwujud. Dengan alasan tersebut, jepang tertarik membantu Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumber daya alam yang besar. Dismaping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan (Achdyat Atmawinata, Drajat Irianto, dkk)[[3]](#footnote-3)

Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk kedalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk mensejajaran diri dengan negara-negara lain yang telah maju, salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bentuk IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*). Dari berbagai pertemuan antara Jepang dan Indonesia ketika membahas poin-poin rencana kerjasama IJEPA, pemerintah Indonesia tertarik pada kemitraan tersebut karena salah satu poin pembahasan IJEPA adalah kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Kedua negara melakukan negosiasi dengan mengharapkan hasil kerjasama yang berdampak positif bagi keduanya khususnya Indonesia.

Negosiasi antara Indonesia dan Jepang kemudian ditindak lanjuti dengan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengesahan *Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for Economic Partnership* IJEPA.[[4]](#footnote-4)

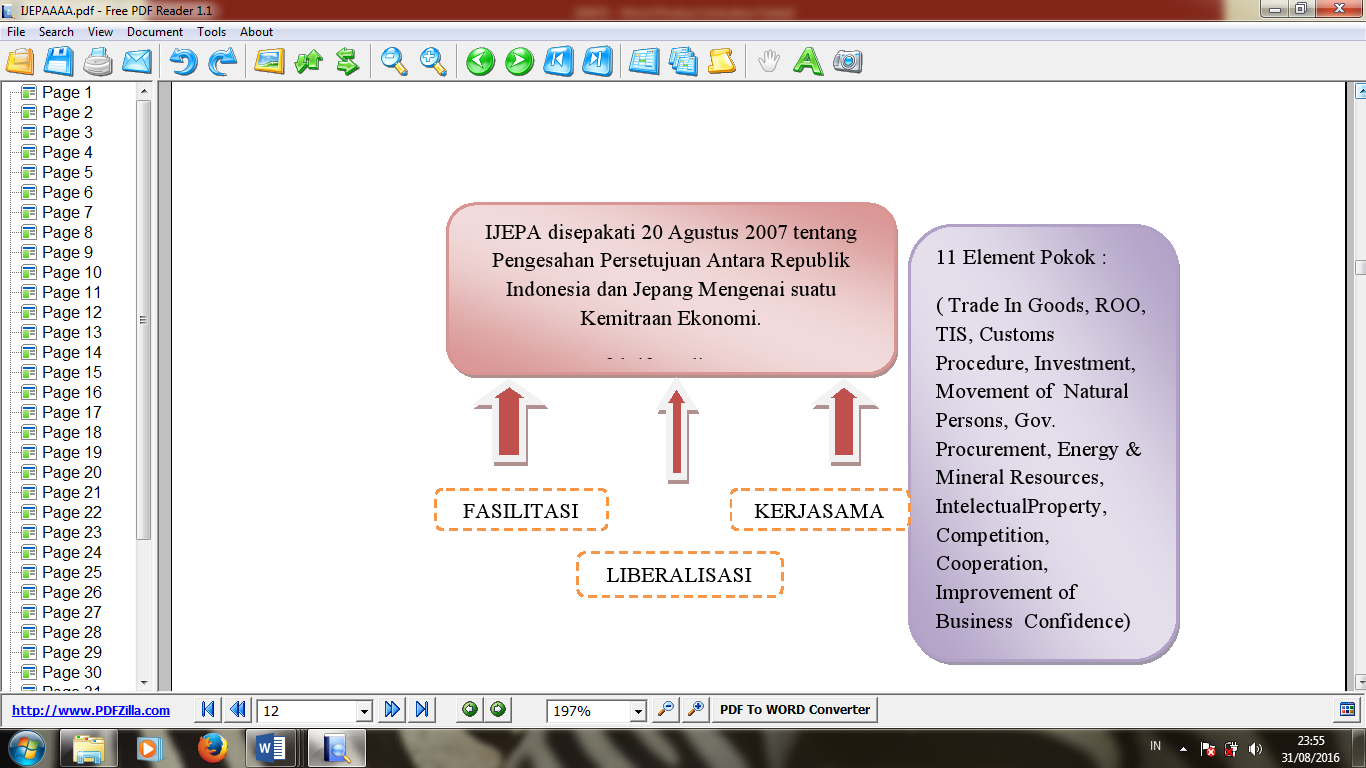
Sebelum kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dituangkan ke dalam suatu ikatan perjanjian yang diberi nama *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kedua negara ini jauh sebelumnya telah membina hubungan baik. Hal ini ditandai dengan pembayaran perampasan Jepang dan beberapa bantuan termasuk ODA-*Official Development Assistance* yang diberikan kepada Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Jepang terhadap negara bekas jajahannya. Selain itu, adanya paradigma liberalisasi yang intinya keterbukaan menjadikan perdagangan bebas sebagai salah satu jalan berkompetisi mulai merambah negara-negara yang ada di dunia.[[5]](#footnote-5)

Dan pada akhirnya tanggal 20 Agustus 2007 telah ditandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia Jepang dalam kerangka IJEPA oleh kedua negara, yaitu antara Perdana Menter Jepang Shinzo Abe, yang datang secara khusus ke Indonesia, dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Penandatanganan tersebut menghasilkan beberapa inti dasar dari kerjasama IJEPA yang dilakukan oleh Indonesia-Jepang.

1. **Struktur dan Tugas IJEPA**

Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan IJEPA dalamrangka mewujudkan kerjasama ekonomi secara komprehensif dilandasi oleh tiga pilar yaitu:

1. *Fasilitasi* perdagangan yaitu pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan kinerja kerja bea cukai, penanganan di pelabuhan dan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan.
2. *Liberalisasi* yaitu pengurangan atau penghapusan balasan dan hambatan lain perdagangan.
3. Kerjasama yaitu fitur yang khusus berkaitan dengan IJEPA dimana kedua pihak menyetujui untuk bekerjasama di berbagai bidang di luar perdagangan dan dimana pihak Jepang berkomitmen melakukan kegiatan untuk membangun kapasitas dan sumber-sumber daya alam.



*Sumber: Kementrian Perindustrian 2014*

**Gambar**

**Tiga Pilar Utama IJEPA**

Berkompetisi dalam perdagangan bebas, Indonesia dan Jepang bukanlah tandingan yang setara. Dari segi kemajuan yang dimiliki kedua negara ini jauh berbeda. Jepang merupakan negara yang lebih unggul dari sektor ekonomi dengan ditunjang oleh kemajuan industrinya, namun terbatas dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sebaliknya, Indonesia negara yang berkembang masih dalam tahap pembelajaran, namun memiliki SDA yang tidak dimiliki oleh Jepang dan jumlah penduduk yang banyak.

Hingga saat ini, Jepang memiliki ketergantungan energi terhadap Indonesia. Segala keterbatasan dan ketergantungan yang dimiliki oleh kedua negara inilah menjadi landasan terbentuknya kerjasama bilateral IJEPA. Bermula dari negosiasipanjang, menginspirasi Susilo Bambang Yudhoyono membentuk kerjasama baru dengan Jepang, pada pertemuan APEC di Chili (November 2004). Pertemuan ini juga dihadiri Junichiro Koizumi yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang.[[6]](#footnote-6)

Setelah kedua petinggi negara ini bertemu, pembicaraan kemudian ditindak lanjuti oleh masing-masing Menteri Perdagangan dan membentuk *Joint Study Group* (JSG) guna mengetahui celah dari kelemahan dan kelebihan kedua negara tersebut. Dari kesepaatan perundingan melalui pembicaraan di JSG, kerjasama IJEPA akhirnya ditandatangani tiga tahun kemudian pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Shinzo Abe yang pada waktu itu menggantikan posisi Koizumi sebagai PM Jepang. Setahun kemudia tepatnya pada tahun 2008 IJEPA baru terlaksana.

Dalam Hubungan Bilateral Indonesia dan Jepang ini akan mengalami perubahan sosial, perubahan sosial dapat berlangsung dalam 3 proses, yang masing-masingnya bisa berlaku dalam hal atau ciri yang sebaliknya. Intinya ialah proses perubahan dapat berlangsung lambat (*evolusi*) dan dapat pula berlangsung cepat (*revolusi*). Proses perubahan sosial dapat terjadi dengan disadari atau berdasarkan pada kesadaran kelompok masyarakat itu sendiri dan bisa pula terjadi tanpa disadari. (Rudi, 2007:10)

Inti dasar dari kerjasama IJEPA adalah:

1. Memfasilitasi, mempromosikan, dan meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa antara Jepang dan Indonesia
2. Meningkatkan kesempatan investasi dan mempromosikan aktivitas investasi melalui penguatan perlindungan untuk *investasi* dan aktivitasnya antara Jepang dengan Indonesia
3. Menjamin proteksi hak-hak intelektual dan mempromosikan kerjasama di bidang-bidang yang sudah disepakati
4. Meningkatkan transparasi rezim pemerintahan kedua negara dan mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan antara Jepang dengan Indonesia
5. Mempromosikan kompetisi
6. Mengembangkan lingkungan bisnis diantara kedua belah pihak
7. Membuat sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan kerjasama yang lebih erat didalam bidang-bidang yang telah disepakati
8. Menciptakan prosedur yang efektif untuk *implementasi* dan *aplikasi* kesepakatan ini untuk resolusi resolusi dari pertikaian yang mungkin muncul dikemudian hari.[[7]](#footnote-7)

IJEPA merupakan kerjasama yang lebih menguntungkan dan memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia daripada kesepakatan dalam WTO. Hal ini mengakibatkan IJEPA juga dikenal dengan nama WTO-plus. Adapun yang diatur dalam kesepakatan IJEPA secara garis besar adalah:[[8]](#footnote-8)

1. *Trade in goods, tariffs and non-tariff measures, rules of origin trade remedies* (Perdagangan dalam barang: ketentuan tarif, non-tarif, ketentuan asal produk, penyelasaian dispute mengenai mutu barang).
2. *Trade in service* (perdagangan dalam jasa). Kedua pihak akan membuat komitmen dalam berbagai sektor yang mencakup profesional atau bisnis, komunikasi, kontruksi, distribusi, pendidikan, jasa kesehatan, dan sosial, pariwisata dan jasa perjalanan, serta jasa transfortasi.
3. *Customs procedure* (Prosedur bea cukai). Kedua pihak akan memperkenalkan pertukaran informasi dan kerjasama yang bermaksud untuk fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi guna memastikan efektifitasnya.
4. *Invesment* (Penanaman modal). IJEPA akan menyajikan suatu kerangka kerja bagi perluasan dan fasilitasi investasi lintas batas antara kedua negara melalui kesepakatan-kesepakatan mengenai perlakuan nasional.
5. *Movement of natural persons* (Fasilitasi bergeraknya sumber daya manusia). Kedua pihak akan menyajikan suatu kerangka kerja bagi fasilitasi bergeraknya orang-orang dalam berbagai kategori termasuk kunjungan jangka pendek, perpindahan intra perusahaan, dan kunjungan orang-orang biasa terlibat dalam jasa-jasa profesional.
6. *Energy and mineral resources* (Sumber daya energi dan mineral). Signifikansi sumber daya energi dan mineral bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di kawasan.
7. *Intelectual property right* (Hak cipta). Kedua pihak akan memastikan perlindungan efektif atas hak cipta, mempromosikan efisiensi dan transparansi dalam sistem administrasi perlindungan hak cipta, pemalsuan dan pembajakan. IJEPA akan menyediakan dasar bagi kedua pihak untuk kerjasama dalam bidang-bidang rincian hak cipta yang saling menguntungkan.
8. *Government procurement* (Prosedur pembelian oleh pemerintah). IJEPA akan menyusun suatu kerangka bagi pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua pemerintah, sektor swasta dan organisas-organisasi relevan lainnya.
9. *Competition* (Persaingan). Kedua pihak akan mempromosikan persaingan dengan menangani kegiatan-kegiatan anti persaingan dan bekerjasama dalam memperkuat kebijakan persaingan, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.
10. *Improvement of business enviroment and Promotion of businesss confidence* (Perbaikan dalam lingkungan bisnis dan promosi kepercayaan bisnis). IJEPA akan menyediakan suatu mekanisme bagi perbaikan lingkungan promosi kepercayaan bisnis, dengan partisipasi kedua pemerintahan, sektor-sektor swasta yang bersangkutan dan organisasi-organisasi yang relevan.
11. *Cooperation* (Kerjasama). Kedua pihak akan mempromosikan kerjasama bilateral bagi pengembangan kapasitas dalam berbagai bidang, seperti industri dan manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, promosi perdagangan dan industri pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pembelian oleh pemerintah, lingkungan hidup, dengan maksud meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua pihak. Kedua pihak dapat juga mempertimbangkan kerjasama dalam bidang-bidang lain yang disetujui bersama di waktu yang akan datang.[[9]](#footnote-9)

Perkembangan IJEPA diawali sejak Oktober tahun 2004 secara nasional, Indonesia dan Jepang ingin meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara, termasuk perluasan kerjasama di bidang ekonomi. Melalui *expert group* (EG) yang dibentuk oleh kedua negara (Kemenakertrans bertindak sebagai chairman), telah disepakati 11 bidang fokus pengembangan ekonomi, diantaranya adalah bidang ketenagakerjaan. Dalam berita kementrian perindustrian Skema kerjasama *Manufacturing Industrial Development Center* (MIDEC) antara Indonesia dengan Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian kerjasama Indonesia Jepang yang disebut *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dalam lima tahun terakhir ini hanya menunjukan kemajuan pada lima sektor industri.[[10]](#footnote-10)

Makanya pemerintah akan mengevaluasi kerjasama ini sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama tersebut pada akhir tahun ini. Sebenarnya kerjasama ini berfokus pada 11 sektor industri. Namun, hanya beberapa sektor industri yang menunjukan kemajuan.

1. **Kepentingan Kedua Negara dalam Kerjasama IJEPA**

Pada dasarnya segala sesuatu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sama halnya dengan perjanjian IJEPA, di mana dalam sisi positifnya adalah kedua negara dapat meningkatkan akses pasar ke negara-negara penyelenggara IJEPA dengan menurunkan hambatan tarif bagi barang-barang komoditi kedua negara, selain itu Indonesia juga diberi investasi dari Jepang yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadi negara yang maju secara finansial, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga adanya sisi negatif dari perjanjian tersebut yang juga dapat merugikan Indonesia.

Setelah berjalan lebih dari dua tahun IJEPA terbukti mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Hal ini sudah diprediksikan sejak awal sejak perjanjian tersebut akan ditandatangani. Pertama-tama kerugian yang harus diderita oleh Indonesia adalah kerugian dalam perjanjian tersebut adalah kerugian yang diderita di sektor penerimaan negara dari pajak, khususnya dari pendapatan bea cukai. Pajak adalah salah satu sumber pemasukan devisa negara yang paling besar bagi Indonesia. Pajak memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pendapatan, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Ketiga fungsi ini mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara.

Kerugian yang diterima Indonesia sejak dijalankannya IJEPA sudah terlihat di tahun pertama, di mana Indonesia kehilangan US$ 43 juta dari penerimaan bea masuk barang impor dari Jepang. Kerugian ini sudah jelas akan lebih merugikan Indonesia di tahun-tahun mendatang karena berdasarkan kesepakatan IJEPA barang impor yang berasal dari Jepang akan semakin dikurangi bea masuknya sampai 0%. Pada akhirnya Indonesia akan mengalami lebih banyak kerugian.

Kerugian yang harus diterima tidak hanya berasal dari penerimaan pajak semata, akan tetapi kerugian yang harus dihadapi juga terdapat dari sektor energi. Akibat dijalankannya kesepakatan IJEPA berakibat pada terancamnya ketahanan energi nasional. Energi memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi hal tersebut terancam dengan dijalankannya IJEPA. Berdasarkan laporan dari Kementrian ESDM tahun 2009, rata-rata produksi minyak bumi dan konsendat di Indonesia hanya mencapai 963.269 barel per hari (bph), sedangkan dari laporan BP Migas di tahun 2010 hanya menunjukkan sedikit peningkatan yaitu 965.269 barel per hari (bph) yang berarti hanya terdapat angka kenaikan sebesar 1.731 (bph). Hal ini tidak diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang mencapai 1.400.000 (bph). Ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap energy cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat produksinya dan menyebabkan terjadinya krisis energi nasional. Hal ini secara tidak langsung dapat mengakibatkan pada merosotnya pertumbuhan ekonomi naisonal.

Dalam perjanjian IJEPA telah disepakati bahwa Indonesia bersedia untuk memasok sumber energi untuk Jepang sebesar 22% dari total kebutuhannya padahal hal tersebut justru makin membahayakan ketahanan energi nasional. Di tahun 2009 nilai ekspor migas Indonesia ke Jepang mencapai US$ 935,7 juta.

Apabila meningat kapasitas produksi migas nasional yang masih rendah dibanding tingkat konsumsinya maka hal ini dipandang ironis. Pemerintah telah menetapkan Undang Undang tentang ketahanan energi nasional yang diatur dalam UU Nomor.3 Tahun.2007 di mana pemerintah negara memiliki kewajiban untuk mempertahankan ketahanan energi nasional agar mencegah terjadinya krisis energi nasional.[[11]](#footnote-11)

Dalam perjanjian ini, kedudukan Indonesia tidak dapat disamakan dengan kedudukan Jepang, Jepang merupakan negara yang cukup maju dari segi ekonomi, pengetahuan, dan juga teknologinya. Di samping itu, dalam sejarah belum pernah terbukti bahwa perjanjian yang diikuti oleh dua negara yang kedudukannya tidak setara mendatangkan banyak keuntungan kepada negara yang kedudukannya lebih rendah dalam perjanjian tersebut seperti yang terjadi pada Indonesia dan Jepang. Perjanjian IJEPA dipandang banyak pihak sebagai perjanjian yang hanya menguntungkan pihak Jepang, namun dalam kenyataannya Indonesia masih mempertahankan perjanjian tersebut.

Dari keterangan di atas tentang kerjasama IJEPA ialah Jepang bersedia untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan anara kedua belah pihak demi terciptanya kemajuan di bidang ekonomi dan juga berlanjutnya hubungan baik antara kedua negara. Akan tetapi di sisi lain banyak juga yang yang beranggapan miring terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa Indonesia masih mempertahankan IJEPA, walaupun dalam perjanjian tersebut Indonesia merupakan pihak yang dirugikan?”

Dalam berhubungan dengan negara lain, sebuah negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebjakan yang diambil oleh suatu negara yang memiliki pengaruh terhadap hubungan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain.

Berbagai penelitian mengenai bantuan luar negeri Jepang telah dilakukan oleh para ahli dari berbagai negara, yang mengupas sudut pandang tersebut dari sudut pandang ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan. Di antara pendekatan-pendekatan ini, pendekatan ekonomi telah mendominasi studi tentang bantuan Jepang sejak 1960-an yang menunjukkan pendekatan tradisional dalam politik luar negri Jepang yang memisahkan antara politik, dan ekonomi.[[12]](#footnote-12)

1. **Kepentingan Indonesia**

Kepentingan Indonesia adalah tujuan yang paling mendasar dan faktor yang paling mementukan yang memandu para pembuat keputusan dalam menentukan politik luar negeri, dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

*1) Self Preservation*

*2) Security*

*3) National well-being*

*4) Protection and advancement of technology*

*5) The pursuit of power.*

Sementara itu **Hans. J. Morgenthau** menjelaskan dalam bukunya “*Politics Among The Nation*” yang menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan setiap negara untuk mengejar power (kekuatan) yang diwujudkan dalam elemen-elemen geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapan militer, jumlah penduduk, karakter nasional, kualitas diplomasi, dan secara keseluruhan disebut dengan “*The degree of determination with which a nation support the foreign policies of its government in peace of war.*”

Dari sini kita bisa melihat baagaimana kepentingan Indonesia yang menjadi dasar dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan kerjasama IJEPA dengan Jepang. Kepentingan pertama Indonesia memiliki kepentingan di dalam bidang perdagangan, khususnya di bidang perikanan di mana Indonesia merupakan salah satu pengekspor yang cukup besar bagi Jepang. Selain itu Jepang juga nerupakan target pasar utama bagi produk-produk tersebut.

Kedua, Indonesia memiliki kepentingan yang cukup besar pada investasi yang disalurkan Jepang kepada Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang meruupakan negara investor terbesar sejak tahun 1967. Dengan disalurkannya investasi yang disalurkan Jepang maka diharapkan Indonesia dapat mendorong kemajuan ekonominya.[[13]](#footnote-13)

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah Indoensia juga memiliki kepentingan untuk memajukan industrinya. Hal itu karena pemerintah menganggap bahwa industri manufaktur merupakan penyumbang bagi kemajuan ekonomi bangsa yang paling cepat karena nilainya yang lebih tinggi dari komoditi lain. Dengan begitu pemerintah berharap dapat meningkatkan pertumbuhan nasionalnya.

Yang terakhir adalah kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya, khususnya dalam bidang kesehatan di mana Indoensia diberi kesempatan oleh Jepang dalam kerangka kerjasama IJEPA untuk mengirimkan tenaga semi terampilnya seperti para perawat (*nurse*) untuk bekerja di Jepang dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan juga pengalaman mereka. Pada akhirnya dari pengalaman yang mereka dapat, dapat diaplikasikan di Indonesia sehingga mampu emajukan bidang kesehatan Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Dari uraian di atas dapat kita lihat seberapa besar kepentingan Indonesia terhadap Jepang dalam rangka kerjasama IJEPA ini. Kerjasama ini merupakan momen penting bagi Indonesia untuk membangun negaranya sehingga Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya.

Dengan adanya perjanjian kerjasama IJEPA, Indonesia akan memperoleh beberapa keuntungan dan manfaat, antara lain:

a. Kemitraan dalam IJEPA menggambarkan kepentingan dari kedua negara yang mengikatkan diri;

b. Manfaat dari IJEPA

1) di bidang perdagangan: barang dan jasa;

2) di bidang investasi dan bisnis;

3) peningkatan kapasitas bagi Indonesia

c. Elemen Utama EPA yang penting bagi Indonesia:

1) Peningkatan akses pasar produk ekspor Indonesia ke Jepang;

2) Kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia sehingga:

(1) Keuntungan dari IJEPA optimal bagi Indonesia;

(2) Keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, termasuk UKM;

a. IJEPA dengan Jepang merupakan perjanjian komprehensif yang pertama;

b. IJEPA konsisten dan komplementer dengan komitmen dan perjanjian

perdagangan lain, yaitu dalam lingkup WTO, lingkup regional: ASEAN

ataupun ASEAN + 1, dan dalam forum bilateral;

1. IJEPA konsisten dengan program reformasi dalam negeri:
2. strategi ofensif untuk meraih pasar untuk produk yang kita dapat bersaing dan meningkatkan investasi;
3. strategi defensif untuk melindungi yang belum siap (yaitu jangka waktu yang lebih lama atau tidak masuk dalam komitmen);

Selain itu dengan adanya IJEPA Indonesia memiliki beberapa kepentingan, yaitu:

a. IJEPA dapat meningkatkan investasi dari Jepang;

b. IJEPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, antara lain:

1) Peningkatan kapasitas, khususnya di area standardisasi produk dan pengujian; kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman;

2) Pelatihan keterampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan internasional;

3) Program-program peningkatan kapasitas di bidang energi, industri, pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM; Sebaliknya, Jepang juga memiliki beberapa kepentingan dengan adanya IJEPA, antara lain karena:

4) Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan secara ekonomi, politik dan geografi adalah penting dan strategis;

5) Transparansi dan kepastian hukum untuk investasi, termasuk u ntuk investasi yang sudah ada

**Manfaat Sektor Barang dari IJEPA**

1. Kesepakatan liberalisasi pasar oleh Jepang mencakup lebih dari 90% barang yang diekspor Indonesia ke Jepang, termasuk produk industri dan agri-bisnis;

2. Komitmen ini akan memberikan peluang yang setara kepada Indonesia di pasar Jepang dalam menghadapi negara pesaing tertentu yang sudah mengadakan perjanjian IJEPA dengan Jepang (antara lain: Thailand, Filipina, Malaysia, Meksiko);

3. Uraian berikut sebagai gambaran beberapa produk yang memperoleh keuntungan dengan dibentuknya IJEPA, antara lain produk sektor industri yang padat karya:

**Produk Kayu**

1.Penghapusan bea masuk ke pasar Jepang sebagian produk kayu;

2.Penghapusan eskalasi tarif (semakin tinggi tingkat prosesing, semakin tinggi tarif impor yang dikenakan misalnya bahan baku = 0% tarif, olahan tarif lebih tinggi), contoh: mebel, produk dari kayu yang lain;

3. Hal ini diharapkan meningkatkan industri perkayuan di Indonesia Produk lainnya Makanan dan minuman; buah-buahan (antara lain nanas, pisang), teh dan kopi serta produk TPT; dengan adanya IJEPA dapat memberi peluang peningkatan pangsa pasar ekspor indonesia ke pasar Jepang karena tarif bea masuknya turun atau dihapuskan (misalnya tekstil dan pakaian diturunkan menjadi 0%).

**Sektor Jasa**

1. Komitmen di bidang jasa tenaga kerja (*mode 4- movement of natural persons*) yang diperoleh Indonesia dari Jepang akan memberikan peluang untuk pengiriman tenaga kerja terampil seperti juru rawat, pekerja di sektor hotel dan pariwisata, dan pelaut;
2. Penyediaan jasa yang lebih efisien diharapkan akan meningkatkan daya saing produk Indonesia;

**Manfaat Investasi dari IJEPA**

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara tujuan menurun sejak krisis ekonomi.

1. Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah ke sektor otomotif/suku

cadang,elektrik/elektronik dan sektor kimia serta peralatan kantor;

* 1. Memperdalam struktur industri dengan investasi industri pendukung (*components, parts, mould and dies*), di mana supplier Indonesia dapat juga berkembang dengan fasilitasi dari *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC);
  2. Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan dan kehutanan, di mana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerjasama;
  3. Investasi di bidang energi, termasuk *bio-fuel* yang juga akan di fasilitasi melalui proyek kerjasama;

1. Di bidang jasa, aliran terbesar adalah ke sektor keuangan dan asuransi, perdagangan, transportasi dan real estate;
2. IJEPA akan meningkatkan iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui perbaikan/kepastian hukum bagi investor;
3. Hasil IJEPA dan paket kebijakan investasi lain yang sedang dilakukan Pemerintah RI diharapkan akan menjadi kerangka hukum baru dan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlakuan lebih baik dan pasti (UU Penanaman Modal, Revisi UU Pajak dan Bea Cukai);
4. Keuntungan IJEPA diharapkan akan memberikan daya tarik bagi investor asing berinvestasi di Indonesia. Manfaat Kerjasama di Bidang Peningkatan Kapasitas (*Cooperation in Capacity Building*)
5. Selain sepakat untuk menghapuskan/mengurangi bea masuk, kedua Negara juga menyepakati kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas produsen penghasil produk industri pertanian, perikanan dan kehutanan;
6. Aspek Kerjasama di bidang akses pasar merupakan hal penting dari IJEPA, dan inilah alasan mengapa disebut WTO plus:
7. Kerjasama tersebut meliputi: Pembangunan Pusat Industri Manufaktur yang berfokus pada Otomotif, *Mould and Dyes*, dan *Welding*, promosi ekspor dan bantuan untuk UKM;
8. Kerjasama untuk menjamin ketersediaan Sumber Perikanan secara berkesinambungan (*Sustained Marine Resources*) merupakan hal penting dalam kerjasama dan membantu Indonesia memelihara sumber bahari dalam jangka panjang;
9. Agribisnis akan diuntungkan dari beberapa proyek seperti Pengembangan Pusat Makanan dan Minuman dan juga program lain untuk para petani kecil dan nelayan;
10. Jepang akan memperpanjang bantuan teknis di sejumlah sektor lain yang penting (antara lain energi, pelatihan tenaga kerja dan keterampilan, industri manufaktur, agribisnis, perikanan, promosi ekspor dan UKM);
11. Pemanfaatan kayu (ukuran kecil) untuk industri guna membantu industri sektor kehutanan;
12. Kerjasama ekonomi dan teknis di bidang pelatihan dan penelitian yang akan dibahas lebih lanjut;

**2.Kepentingan Jepang**

Namun, terlepas dari hal itu, pemerintah Jepang pun memiliki tujuan yang besar melalui kesepakatan IJEPA ini. Tujuan tersebut antara lain pada bidang energi dan sumber daya mineral dan investasi.[[15]](#footnote-15)

a. Bidang energi dan sumber daya mineral

Pada kesepakatan IJEPA di bidang energi dan sumber daya mineral (*Energy and Mineral Resources*), pemerintah Indonesia memberikan ekses pasar melalui penurunan tarif bea masuk. Selain itu, kedua pemerintah juga menyepakati berbagai bentuk kerjasama di bidang perdagangan di sektor energi dan sumber daya mineral seperti eksplorasi serta eksploitasi migas dan sumber daya mineral.

Indonesia merupakan eksportir gas alam cair terbesar di Jepang. Jepang membeli 50%-70% eksport gas alam cair dari Indonesia. Namun, semenjak tahun 2004, dimana Indonesia telah menjadi net importir komoditas minyak mentah. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan ekspor gas alam cair ke Jepang karena digunakan untuk menutupi kurangnya suplai minyak domestik. Situasi ini membuat pemerintah Jepang kebingungan dalam memenuhi energi domestiknya karena sebagian besar perusahaan-perusahaan domestik miliknya menggunakan gas alam cair yang berasal dari Indonesia seperti Kansai Electric Power, Chubu Electric, Kyushu Electric, Osaka Gas, Toho Gas, dan Nippon Steel Corp. Hal ini menyebabkan pemerintah Jepang membuat suatu strategi yang dinamakan *Japan’s New National Energy Strategy* yaitu peningkatan jumlah impor minyak yang awalnya 15 % menjadi 40% dari total impor Jepang.[[16]](#footnote-16) Namun, secara tidak sengaja pemerintah Indonesia mengajukan kesepakatan dua negara (IJEPA). Hal ini tentu tidak disia-siakan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dalam kesepakatan tersebut pemerintah Jepang mengajukan formula-formula mengenai ekspor gas alam cair ke Jepang yang tentunya akan membantu strategi Jepang dalam suplai energi seperti berinvestasi pada sektor migas. Pihak Jepang memberikan investasi berupa pembangunan kilang penyulingan gas alam cair seperti di daerah Banggai (Sulawesi Tengah). Pada daerah Banggai, pemerintah Jepang memberikan bantuannya melalui Mitsubishi Incorporation untuk mempercepat pembangunan pabrik penyulingan gas.[[17]](#footnote-17)

Selain itu, melalui IJEPA, pemerintah Jepang juga memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia mengenai ketahanan energi (listrik) bagi perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2008 kemarin, Indonesia kekurangan pasokan listrik yang dikarenakan keterlambatan suplai pasokan batubara. Hal ini membuat banyak perusahaan Jepang di Indonesia menjadi terhambat dalam berproduksi. Pemerintah Jepang mengambil tindakan untuk memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia bahwa jika perusahaan-perusahaan Jepang tersebut tidak diberikan kepastian atas suplai energi (listrik) maka perusahaan-perusahaan tersebut akan mencabut investasinya dari Indonesia.[[18]](#footnote-18)

b. Bidang Investasi

Pada sisi investasi, menurut statistik, jumlah investasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dari tahun ke tahun meningkat secara cukup tajam. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua negara dalam IJEPA, investasi yang dilakukan oleh Jepang pun meningkat tajam hingga lebih dari 100%.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini berhubungan dengan sektor industri manufaktur yang ada Indonesia. Sebagai tambahan, menurut Dubes Shiojiri, lebih dari 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Melalui investasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada infrastruktur di Indonesia, secara tidak langsung akan membantu kinerja dari perusahaan Jepang itu sendiri. Selain pada infrastruktur, pemerintah Jepang juga memberikan investasi pada sektor migas. Pada sektor migas ini, pemerintah Jepang memberikan investasi yang cukup besar karena pemerintah Jepang memiliki kepentingan khusus pada sektor migas khususnya pada gas alam cair.

Secara garis besar, investasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang itu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan yang cukup besar. Pada sektor infrastruktur, investasi yang diberikan ini nantinya akan memberikan kemudahan bagi perusahaan Jepang untuk melakukan distribusi sehingga biaya transportasinya pun setidaknya dapat berkurang. Kemudian, dari sisi sektor migas, investasi yang dilakukan, contohnya percepatan pembangunan kilang penyulingan gas alam di daerah Banggai, nantinya akan memberikan daya tawar yang tinggi bagi pemerintah Jepang untuk mendapatkan pasokan ekspor migas, khususnya gas alam cair, yang lebih besar lagi.

1. *“RI-Jepang-Sepakat-Evaluasi-IJEPA”* dalam [http://www.kemenperin.go.id/artikel/3729/](http://www.kemenperin.go.id/artikel/3729/RI-Jepang-Sepakat-Evaluasi-IJEPA) , diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://pakgiman.com/ijepa/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.antaranews.com/internasional>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611-2.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.gfmd.org/pfp/ppd/2358>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://kakniam.wordpress.com/tag/ijepa/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-11)
12. *“Indonesia Jepang Sepakat Review IJEPA”* dalam http://nasional.kontan.co.id/news/., diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. *“Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement Joint Study Group Report”* dalam

    <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. *“David Adam Stott: The Japan-Indonesia Economic Partnership: Agreement Between Equals?, Asia-Pasific Journal: Japan Focus 13 Juli 2008”* dalam <http://www.japanfocus.org/-David_Adam_Stott/2818>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.antara.co.id/en/print/?i=1212860445>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. *“Telly Nathalia, Reuters: Japan firms may quit Indonesia over power crisis”* dalam <http://www.reuters.com/article/rbssOilGasRefiningMarketing/idUSSP8347820080705>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-18)